

Daftar Pustaka

- Abdullah Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah vol. 2, No. 2*.
- Affandi, Anthony. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 5, No 2*. Universitas Bandar Lampung.
- Agustina, Silvia. 2013. Pengaruh Profit Universitas Bnabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri Padang.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Endar. 2016. Empat Kepala Daerah di Nias Pelayanan Publik Dinilai Lumpuh. *Detik Peristiwa*. Terdapat pada <https://www.detikperistiwa.com>. (Diakses 14 Juni 2019).
- Eka, S. 1998. *Publication Information Edisi 1*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Eva. 2019. Standar Pelayanan Publik Kota Pematangsiantar Dinilai Ombudsman. *Portal Berita Info Publiik*. Terdapat pada <http://infopublik.id>. (Diakses 17 Juni 2019).
- Faiq, Hilmi. 2010. PAD Gunung Sitoli Meningkatkan Tiga Kali. *Kompas*. Terdapat pada <https://regional.kompas.com>. (Diakses 13 Juni 2019).
- Fitriani dan Sudiarti. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2 Jilid 2 Hal. 332 – 345*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Gaspersz, Vincent. 2004. *Production Planning And Inventory Control*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Umum.
- Gurning. 2018. Kasus Dugaan Korupsi dan Penggelapan Aset Lahan YPMDU Kabupaten Asahan. *Kompasiana*. Terdapat pada <https://www.kompasiana.com>. (Diakses 17 Juni 2019).
- Halim, Abdul. 2007. *Analisis Investasi Edisi kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat



- Hassan H. S., E. Sheha, dan J. Peppard. 2011. A Framework for E-Service Implementation in the Developing Countries. *International Journal of Customer Relationship Marketing and Management*, 2(1), 55-68.
- Imroatus dan Agus Wahyudin. 2014. Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Jurnal Analisis Akutansi Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri Semarang.
- Juniawan dan Suryantini. 2018. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *Jurnal*. Universitas Udayana.
- Juniwan. 2014. Seluruh Daerah di Sumut Masih Bergantung Dana Transfer. *Medan Bisnis*. Terdapat pada <http://www.medanbisnisdaily.com>. (Diakses 13 Juni 2019)
- Juraidi. 2016. Kota Medan Benahi Fasilitas Kesehatan. *Antara News*. Terdapat pada <https://www.antaraneews.com>. (Diakses 14 Juni 2019).
- Maharani, Atria. 2011. Pengaruh Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap kinerja Manajerial Dengan Ketidakpastian Tugas dan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mamesah, Walewengko, dan Kawung. 2013. Analisis Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Peningkatan Ekonomi Sektor Jasa (Studi Kasus Kota Manado 2007-2013). *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi.
- Manik, Tumpal. 2014. Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Volume 9, Number 2, 2014, pp. 107-124(18)
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marianus. 2017. Menyoroti Pembangunan Infrastruktur di Kepulauan Nias. *Kabar Nias*. Terdapat pada <https://kabarnias.com>. (Diakses 14 Juni 2019).
- Moenir, H.A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muta'ali, Luthfi. 2015. *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG) UGM.
- Nazwar, Chairul dan Sirojuzilam. 2013. Pembangunan Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Perencanaan Wilayah*. Fakultas Ekonomi USU.
- Noor, F, H.2007. *Ekonomi Manajerial Edisi Kesatu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Prakosa, K. B. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi empirik di Wilayah Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 8 (2): 101-118.
- Permatasari, Desy, Y.E. 2014. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jalan di Kabupaten Bogor. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Putra. 2017. Desa Tanpa Listrik di Kecamatan Mazo, Nias Selatan. Terdapat pada <https://utamanews.com>. (Diakses 15 Juni 2019).
- Ratminto dan Atik. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruwanti G., Wahyu S., Sri E. (2018). Capital Expenditure Determinants with Economic Growth as a Moderator in Regency and Municipal Government in South Kalimantan. *International Journal Of Accounting, Finance, And Economics*. STIE Banjarmasin, Indonesia
- Sadali, Fikri, dan Aisyah. 2017. Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pendukung Kondisi Darurat Bencana dan Pengembangan Wilayah. *Jurnal Media Komunikasi Geografi Vol. 18, No.2*. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA dan IGI.
- Salam, Ahmad. 2016. Analisis faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Modal Padapemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Samalua. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Dalam Otonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Akutansi STIE Nias Selatan Volume 2*
- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. 2017. Analisis Anggaran Daerah Tahun 2016. Terdapat pada <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2017/03/LBA-2016.pdf>. (Diakses 13 Juni 2019).
- Sijabat, Reviline. 2013. Pemilihan Moda Pergerakan Komuter di Kecamatan Sayung. *Tugas Akhir*: Universitas Diponegoro.
- Sikoembang, Indra. 2014. Kota Satelit Sempang Empat Asahan Jadi Kawasan Bisnis. *Medan Bisnis*. Tersedia pada <http://www.medanbisnisdaily.com>. (Diakses 13 Juni 2019).
- Sugito. 2017. 22 Daerah di Sumut Berfiskal Rendah. *Medan Bisnis*. Tersedia pada <http://www.medanbisnisdaily.com>. (Diakses 13 Juni 2019).



- Sugiyanta. 2016. Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Vol. 14, No.1*. Universitas Jember.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, Tri. 2006. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000 – 2004*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Susantih, Henny dan Saftiana, Yulia. 2008. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. *Tesis*. Universitas Sriwijaya.
- Swastika, Lingga. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Boyolali Periode Tahun 2005 – 2012. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tjiptono, Fandy. 2000. *Manajemen Jasa Edisi Kedua*. Jakarta: Andy Offset.
- Waruwu, Marinus. 2017. Menyoroti Pembangunan Infrastruktur di Kepulauan Nias. *Kabar Nias*. Terdapat pada <https://kabarnias.com>. (Diakses 13 Juni 2019).

Kabupaten/Kota dalam Angka Tahun 2017

BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur. Negara No. 63 /KEP/M.PAN/7/2003 tentang. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik